

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki keberagaman dalam masyarakatnya. Kondisi keberagaman itu dapat dilihat melalui berbagai suku bangsa, agama, ras, etnik, gender, golongan sosial ekonomi, adat istiadat, tradisi sosial, dan lain-lain. Keragaman ini dikukuhkan oleh faktor geografi Indonesia yang berbentuk kepulauan dan penduduk yang terpisah-pisah satu sama lain.

Keberagaman masyarakat Indonesia tersebut merupakan suatu khazanah tersendiri dan kekayaan bangsa, namun bila keberagaman tersebut tidak terjaga dengan baik, tidak didampingi dengan pemahaman budaya secara mendalam, maka bisa berakibat fatal seperti *prejudis*, *stereotip*, *diskriminasi*, bahkan kekerasan bernuansa SARA.

Pada konteks keindonesiaan, kekerasan bernuansa SARA itu dapat dilihat dari berbagai kasus yang pernah terjadi seperti konflik Poso dan Sambas. Konflik Poso merupakan konflik yang dilatarbelakangi unsur sosial-budaya dan agama. Suatu peristiwa berdarah, penusukan terhadap seorang pemuda Muslim yang sedang tidur-tiduran di masjid kelurahan Sayo sambil menunggu makan sahur oleh seorang pemuda Kristen pada tanggal 24 Desember 1998 malam Natal yang bertepatan dengan bulan Ramadhan. Peristiwa ini ditengarai sebagai awal konflik Poso yang kemudian

berkepanjangan dengan intensitas yang semakin tinggi hingga tahun 2002.¹

Selain itu, menurut Igneus Alganih menyebutkan dalam hasil penelitiannya, yaitu:

“Konflik Poso sebenarnya adalah konflik realistik yaitu, perebutan kekuasaan politik antar elit politik lokal di Poso yang kemudian massa dilibatkan dengan identitas agama dan etnis dengan tujuan untuk memobilisasi massa dalam memperoleh kekuasaan. Ketika konflik menyentuh ranah agama membuat pertikaian menjadi konflik non realistik bernuansa SARA dan menjadikan konflik terjadi berkepanjangan. Mudah-mudahan massa termobilisasi dalam konflik komunal di Poso, dipengaruhi juga oleh permasalahan historis yang dimanfaatkan oleh elit politik lokal melalui isu berupa kecemburuan sosial-ekonomi dan sosial politik antara penduduk peribumi yaitu etnis Pamona, Mori dan Lore (mayoritas agama Kristen) yang merasa termarginalisasikan terhadap kehadiran dari etnis Jawa, Bugis, dan Makassar (mayoritas beragama Islam). Penduduk pendatang ini yang menguasai perekonomian di Poso dan mendominasi jabatan-jabatan politik di pemerintahan Kabupaten Poso. Ketika ideologis agama dijadikan isu utama sebagai perekat kelompok membuat konflik yang awalnya berupa tawuran antar pemuda kemudian berubah menjadi perang saudara bernuansa SARA.”²

Sejenis dengan konflik Poso, pada konflik Sambas yang melibatkan masyarakat pribumi di Kalimantan Barat (Dayak Sambas dan Melayu Sambas) dengan masyarakat pendatang baru dari Madura dilatarbelakangi oleh permasalahan sosial-budaya. Alqadrie melihat faktor pemicu konflik ini, yaitu:

struktur ketidakadilan, termasuk di dalamnya kurang berfungsinya aparat keamanan dan jaringan monopoli terhadap hasil primadona daerah ini; kompetisi ekonomi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, hilang dan berpindahnya kesempatan kerja dan hak kepemilikan; premanisme, tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh orang-orang pendatang Madura; kebiasaan orang Madura membawa

¹ Haidlor Ali Ahmad, “Kerjasama Antar Umat Beragama dalam Wujud Kearifan Lokal di Kabupaten Poso”, *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Volume VIII, Nomor 30, April-Juni 2009. Hal. 174.

² Igneus Alganih, *Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)*, Skripsi tidak diterbitkan, FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, Hal. 104.

senjata tajam di tempat-tempat umum dan sangat mudah menggunakannya dalam pemecahan masalah; pendirian tempat ibadah dan pelaksanaan pernikahan secara eksklusif yang dilakukan oleh orang Madura; pertunjukan *ronggeng* di kalangan komunitas Madura Sambas dengan perjudian dan minum-minuman keras; tidak mengakui hukum adat setempat yang berbau non-muslim.³

Karakter dan perilaku negatif pendatang baru Madura yang membangga-banggakan tradisi dan budaya sendiri serta kurang tertarik atau tidak menghormati tradisi dan adat istiadat setempat juga menjadi salah satu pemicu konflik yang terjadi selama 9 kali sepanjang tahun 1962-1999.⁴ Konflik ini mencapai puncaknya pada tahun 1999 ketika Dayak Sambas bergabung dengan Melayu Sambas untuk menghadapi Madura Sambas.

Terjadinya konflik Poso dan Sambas tidak terlepas dari kontrol negara, seperti yang dikatakan Syaifuddin dalam tulisannya:

“Sebagian orang berpendapat bahwa konflik-konflik itu terjadi karena kontrol negara yang selama Orde Baru yang bersifat otoriter telah melonggar, tetapi menjadikan kontrol itu kembali ketat nampaknya bukan jalan keluar yang terbaik karena Indonesia (pemerintah) akan berhadapan dengan arus kekuatan global yang lebih menyukai demokrasi, sehingga secara politik negara ini akan tersingkir dari pergaulan dunia. Akan tetapi, membuka lebih lebar lagi “keran-keran” keterbukaan juga mengandung risiko jangka panjang, yakni kemungkinan tercerai-berainya negara-bangsa ini menjadi sejumlah negara-negara yang lebih kecil.”⁵

Sejalan dengan itu diperlukan suatu cara pandang baru sebagai alternatif dan solusi terbaik untuk mengambat terjadinya konflik dan meningkatkan rasa keindonesiaan agar keberagaman masyarakat Indonesia

³ Syarif Ibrahim Alqadrie, “Konflik Etnis di Ambon dan Sambas: Suatu Tinjauan Sosiologis”, *Jurnal Antropologi Indonesia*, 1999, Hal. 51-52.

⁴ *Ibid.*, lihat hal. 47 dan 51.

⁵ Achmad Fedyani Syaifuddin, “Membumikan Multikulturalisme di Indonesia,” *Etnovisi: Jurnal Antropologi Sosial Budaya*, Vol. II No. 1, April 2006. Hal. 8.

bisa terakomodasi dengan baik dan tidak menjadikan Indonesia terjerumus ke dalam perpecahan. Jalan multikulturalisme dianggap dapat menjadi alternatif.

Secara etimologis multikulturalisme mengandung dua pengertian yaitu “*multi*” yang berarti plural (berjenis-jenis) dan “*kultur*” yang berarti budaya. Calhoun, Light, & Keller (1989) mendefinisikan bahwa *multiculturalism is an approach to life in a pluralistic society which calls for finding ways for people to understand and interact with one another that do not depend on their sameness but rather on respect for their differences.*⁶ Lebih lanjut menurut Lawrence A. Blum dalam Lubis memahami multikulturalisme sebagai:

Suatu pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain, dalam arti bukan untuk menyetujui seluruh aspek dari budaya tersebut, akan tetapi untuk melihat bagaimana sebuah kebudayaan asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.⁷

Menurut Fay (1996) dalam Lubis memandang multikulturalisme sebagai ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan.⁸

Dengan demikian dapat dikatakan multikulturalisme menekankan pada keberagaman dalam masyarakat serta pengakuan dan kesetaraan terhadap keragaman tersebut. Sejalan dengan itu masing-masing keberagaman saling berinteraksi dan berkomunikasi. Keberagaman,

⁶ Craigh Calhoun, Donald Light, & Suzzane Keller, *Sociology* (New York: McGraw-Hill Inc., 1989), Hal. 237.

⁷ Akhyar Yusuf Lubis, *Dekonstruksi Epistemologi Modern: Dari Posmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme, Hingga Culture Studies* (Jakarta: Pusaka Indonesia Satu, 2006), Hal: 174.

⁸ *Ibid.*, Hal: 169.

kesetaraan, pengakuan, interaksi dan komunikasi merupakan konsep kunci dari multikulturalisme. Dari konsep multikulturalisme inilah kemudian muncul gagasan normatif mengenai kerukunan, toleransi, saling menghargai perbedaan dan hak-hak masing-masing kebudayaan penyusun suatu bangsa.

Masyarakat multikultural di dalam masyarakat Indonesia baru tidak lahir begitu saja tetapi merupakan upaya yang berkesinambungan dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia multikultural adalah hasil dari suatu proses pembudayaan.⁹ Proses pembudayaan ini dapat ditanamkan melalui ranah pendidikan.

Penanaman nilai multikultural dalam pendidikan merupakan fenomena yang relatif baru dalam dunia pendidikan. Ini terjadi setelah Perang Dunia II dengan lahirnya banyak negara, pluralitas di negara-negara Barat akibat migrasi dari negara-negara yang baru merdeka ke Amerika dan Eropa, serta berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi.

Wacana yang hangat terhadap nilai multikultural dalam pendidikan menghasilkan tuntutan implementasi pendidikan multikultural yang kuat dan berhasil dalam sistem pendidikan nasional diberbagai negara. Sejalan dengan itu Banks (1995) dalam Somantrie menyatakan bahwa:

*there is general agreement among most scholars and researchers that, for multicultural education to be implemented successfully, institutional changes must be made, including changes in the curriculum; the teaching materials; teaching and learning styles; the attitudes, perceptions, and behaviors of teachers and administrators; and the goals, norms, and culture of the school.*¹⁰

⁹ H.A.R Tilaar, *Op.Cit.*, Hal. 13.

¹⁰ Hermana Soemantrie, "Konflik dalam Perspektif Pendidikan Multikultural", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Volume 17 No. 6, 2011, Hal. 671.

Apa yang dikemukakan oleh Banks yaitu salah satunya perubahan kurikulum. Kurikulum bersifat dinamis yang harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat menjawab tantangan dan perkembangan zaman. Perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam negeri dan isu-isu mutakhir dari luar negeri yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia merupakan hal-hal yang harus segera ditanggapi dan dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum baru pada setiap jenjang pendidikan.

Kurikulum memiliki peranan yang penting sebagai wahana untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum ibarat cerminan ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan suatu bangsa kelak akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan suatu bangsa pada masa sekarang. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹¹

Kurikulum dan Pembelajaran merupakan dua sisi dari mata uang. Artinya, dalam proses pendidikan dua hal itu tidak dapat dipisahkan. Kurikulum tidak akan berarti tanpa diimplementasikan dalam proses pembelajaran; sebaliknya pembelajaran tidak akan efektif tanpa didasarkan pada kurikulum sebagai pedoman.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 BAB 1 Pasal 1 No. 19.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, kurikulum pendidikan nasional Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Terhitung sejak kemerdekaan, Indonesia telah melewati beberapa kali pergantian dan penyempurnaan kurikulum, diantaranya Rencana Pelajaran 1947, Rencana Pembelajaran Terurai 1952, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Suplemen Kurikulum 1999, Kurikulum 2004, Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.¹² Seiring dengan berubahnya zaman, kurikulum ikut berubah sesuai perubahan yang berlaku pada tatanan nilai kehidupan yang ada pada setiap zaman. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya berbagai perubahan di segala aspek kehidupan (politik, sosial budaya, ekonomi, iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara). Lebih lanjut, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.¹³

Setiap kurikulum memiliki tujuan kurikulum dan tujuan mata pelajaran yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh *zeit geist* atau semangat zaman pada saat kurikulum dibuat. Dari sekian banyak pergantian kurikulum, yang menarik adalah pada Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 yang keduanya merupakan kurikulum berbasis kompetensi.

Pada Kurikulum 2006 mata pelajaran Sejarah Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut:

¹² Loeloek Endah Poerwati dan Sofian Amri, *Panduan Memahami Kurikulum 2013: Sebuah Inovasi Struktur Kurikulum Penunjang Masa Depan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013), Hal. 4-7.

¹³ Osmiati, "Pendidikan di Indonesia: Sejarah Kurikulum dan Kurikulum Sejarah Masa Orde Baru dan Reformasi", *Jurnal Analisis Sejarah*, Volume 4 No. 2, 2014, Hal.75.

1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan.
2. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan.
3. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau.
4. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang.
5. Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun internasional.

Pada tujuan mata pelajaran sejarah dalam Kurikulum 2006 nilai multikultural tidak terlihat secara gamblang. Namun bisa dikaji lebih lanjut pada poin no. 4 dan 5 dalam materi pelajaran sejarah.

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi

pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.¹⁴

Sedangkan mata pelajaran Sejarah Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut:¹⁵

1. Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, melahirkan empati dan perilaku toleran yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan bangsa.
2. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap diri sendiri, masyarakat, dan proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang.
3. Mengembangkan perilaku yang didasarkan pada nilai dan moral yang mencerminkan karakter diri, masyarakat, dan bangsa.
4. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya konsep waktu dan tempat/ruang dalam rangka memahami perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia.
5. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau.

¹⁴ Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Hal. 3

¹⁵ Salinan Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Hal. 422.

6. Mengembangkan kemampuan berpikir historis (*historical thinking*) yang menjadi dasar untuk kemampuan berpikir logis, kreatif, inspiratif, dan inovatif.
7. Menanamkan sikap berorientasi kepada masa kini dan masa depan.

Dapat dilihat pada poin no. 1 bahwa mata pelajaran sejarah memiliki tujuan agar siswa memiliki perilaku toleran dan pada poin no. 3 mengembangkan perilaku yang didasarkan pada nilai dan moral. Pada tujuan tersebut, sikap toleran dan sikap yang berdasarkan pada nilai dan moral tidak hanya dipahami oleh siswa, tetapi juga diterapkan dalam bentuk perilaku.

Dari penjelasan dasar pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana muatan multikultural dan penerapannya dalam kurikulum sejarah nasional. Penelitian ini berupaya memaparkan dan menganalisis mengenai muatan multikultural dalam mata pelajaran sejarah tingkat SMA berdasarkan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Topik penelitian ini dipilih karena penelitian yang mengkaji kearah muatan multikultural dalam kurikulum nasional mata pelajaran Sejarah belum pernah dilakukan.

Penelitian tentang mata pelajaran sejarah dalam kurikulum nasional Indonesia sudah banyak dilakukan, diantaranya, *pertama* penelitian Giri Rachmawati pada tahun 2012 di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta yang meneliti muatan sejarah perempuan dalam mata pelajaran sejarah pada tingkat SMA dalam kurikulum 1994, 2004 dan 2006. *Kedua*, penelitian Umasih pada tahun 2000 di Program Pascasarjana Ilmu

Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang meneliti tentang perubahan kurikulum sejarah Indonesia di SMA. *Ketiga*, penelitian Abdul Syukur pada tahun 2012 di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia yang meneliti pengajaran sejarah Indonesia dalam masa Orde Baru dengan melihat pada kurikulum nasional Indonesia dari sebelum Masa Orde Baru sampai kurikulum 2004.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Secara temporal, penelitian ini dimulai pada tahun 2006 yang merupakan tahun ajaran 2006/2007 diberlakukannya Kurikulum 2006 sebagai kelanjutan dari Kurikulum 2004 (KBK). Sedangkan batas akhir dari penelitian ini adalah tahun 2014 dimana pada tahun ajaran 2013/2014 Kurikulum 2013 pada saat itu diterapkan pertama kali dan berlaku secara terbatas (belum secara nasional). Secara spasial penelitian ini fokus pada muatan multikultural dalam mata pelajaran sejarah tingkat SMA.

2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dan yang menjadi kajian pembahasan dalam penelian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana muatan multikultural dalam mata pelajaran sejarah tingkat SMA berdasarkan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013?

- b. Bagaimana penerapan nilai multikultural dalam mata pelajaran sejarah tingkat SMA berdasarkan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan muatan multikultural dalam kurikulum nasional mata pelajaran sejarah tingkat SMA pada Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.

2. Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk pembuat kurikulum sejarah nasional mengenai nilai multikultural dalam sejarah, juga untuk guru khususnya di tingkat SMA dalam memilih dan memberikan metode pengajaran yang bersifat multikultur. Lebih lanjut lagi, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai multikultural atau pendidikan multikultural.

D. Metode dan Sumber Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah atau historis. Sedangkan untuk penyajian fakta penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif-analitis dengan menggunakan pisau analisis Multikultural.

Berdasarkan kaidah-kaidah dalam penulisan sejarah, metode sejarah mempunyai lima tahapan, yaitu pemilihan topik, *heuristik* (pengumpulan sumber), kritik, interpretasi, dan penulisan (historiografi).¹⁶

Tahap *pertama*, peneliti menentukan topik muatan pendidikan multikultural dalam mata pelajaran sejarah tingkat SMA pada kurikulum nasional Indonesia 2006 – 2014.

Tahap *kedua* yaitu heuristik dimana proses pencarian data dan pengumpulan berbagai sumber penelitian yang berkaitan dengan multikultural dalam kurikulum sejarah nasional. Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan berbagai data yang relevan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh berbagai buku, artikel, surat kabar, jurnal, studi kearsipan dan wawancara.

Data yang telah terkumpul baik dari sumber primer dan sekunder yaitu berupa sumber tertulis dari surat kabar serta sumber lisan dari hasil wawancara dikumpulkan untuk diolah menjadi fakta-fakta sejarah. Adapun untuk studi kepustakaan dan kearsipan peneliti mendapatkan arsip dokumen Standar Kompetensi mata pelajaran Sejarah Kurikulum 2006, Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Kurikulum 2013 beserta lampirannya. Selain arsip, peneliti telah mendapatkan beberapa buku dan jurnal yang terkait dengan topik penelitian. Peneliti juga mengumpulkan dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran sejarah pada Kurikulum

¹⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1999), Hal. 89-105.

2006 dan Kurikulum 2013 dari arsip guru-guru yang menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Studi kepustakaan dan kearsipan dilaksanakan pada: Perpustakaan Pusat Kurikulum, Perpustakaan Kementrian Pendidikan, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Indonesia dan Ruang Baca jurusan pendidikan sejarah dan sosiologi di lantai 4 FIS UNJ. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan mewawancarai guru-guru yang berpengalaman menerapkan KTSP dan Kurikulum 2013. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penerapan muatan multikultural dalam mata pelajaran sejarah di sekolah.

Tahap *ketiga* yaitu kritik dilakukan suatu pengujian terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber yang ada. Peneliti melakukan analisa data melalui metode sejarah dengan melakukan seleksi terhadap data yang ada, ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan teruji.

Tahap *keempat* interpretasi. Pada tahap ini dilakukan analisa dan sintesa dengan menggunakan bantuan dari ilmu lainnya, berupa konsep yang relevan dengan permasalahan yang akan diungkapkan. Peneliti akan menggunakan konsep multikultural dari Akhyar Lubis, H.A.R Tilaar, James Banks, dan Calhoun, Light, & Keller. Interpretasi dilakukan dengan naratif dari segi ruang dan waktu.

Terakhir pada tahap penulisan, peneliti mengungkapkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, jelas dan terstruktur.

2. Sumber Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer dengan mengkaji arsip-arsip dari Pusat Kurikulum mengenai mata pelajaran sejarah nasional pada Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran sejarah yang memiliki pengalaman mengajar dalam Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Selain itu juga kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan.

Sumber sekunder yaitu bahan yang terkumpul dari surat kabar, majalah dan jurnal seperti Kompas, Jurnal Antropologi, Jurnal Pendidikan dan kebudayaan, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan.